ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat demi peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web internet). *E-procurement* dilatarbelakangi oleh kelemahan yang terkait dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak – pihak yang terkait dengan pengadaan. *E-procurement* hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efesien, efektif, adil dan transparan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana analisis didasarkan pada hal – hal yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Penelitian ini bersifat memaparkan dan menganalisis permasalahannya yakni dengan menggunakan data primer dan sekunde, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, membahas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 denga menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah penerapan *E-procurement* terhadap tender elektronik Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) dapat dikategorikan sebagai full *e-procurement* yang dilakukan secara cukup baik sehingga yang mana akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat, dan penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa dalam proses tender elektronik Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) juga sudah diterapkan dan sesuai dengan prinsip – prinsip tersebut sehingga dapat mencerminkan keterbukaan.transparansi dalam pelaksanaan *E-procurement.*

Berdasarkan penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa penerapan *E-Procurement* terhadap pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo mulai dari tahapan awal sampai akhir sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan begitu juga dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa pada pembangunan Jalan Tol ini. *E-Procurement* sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah diharapkan kedepannya dapat di perbaiki lagi baik dari sistem maupun sumberdaya manusianya agara tercipta pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa

Kata Kunci : *E-Procurement,* Tender Elektronik, Pengadaan Barang/Jasa